



KETERLIBATAN ASING DAN ISU PERTAHANAN KEAMANAN

Poltak Partogi Nainggolan*)

Abstrak

Perencanaan dan implementasi kebijakan pemerintah baru Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo diharapkan tidak mengabaikan perkembangan dinamis di kawasan dan tetap melihat pentingnya menjaga kemandirian dan kedaulatan nasional dari berbagai bentuk keterlibatan dan intervensi asing. Oleh karena itu, implementasi kebijakan luar negeri dan pertahanan pemerintah tidak akan mudah karena masih banyaknya kendala yang dihadapi. Kendala tersebut tidak muncul semata-mata dari kinerja politik luar negeri yang selama ini dinilai inward looking tetapi juga rentan terhadap keterlibatan asing sejak perencanaan kebijakannya.

Pendahuluan

Sembilan agenda prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi (Nawa Cita) bertitik-tolak dari kepentingan nasional. Sesuai kondisi geografis negara dan perhitungan faktor geopolitik dan geostrategis, kesadaran tentang pentingnya menjaga dan melindungi negara dari berbagai bentuk keterlibatan dan intervensi asing dalam penentuan dan penyusunan kebijakan luar negerinya, seharusnya sudah muncul dengan sendirinya. Meskipun demikian, politik rezim yang keliru bisa saja menghilangkan kesadaran ini sehingga penentuan dan penyusunan kebijakan luar negeri menjadi hal yang tidak mudah dilakukan.

Akibat sistem politik yang otoriter dalam beberapa dasawarsa lalu, permasalahan yang dihadapi Indonesia di kawasan dan dunia internasional menjadi semakin kompleks dan sulit dihadapi. Oleh karena itu, kiranya menjadi logis ketika periode pemerintahan sekarang memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah kehadiran dan keterlibatan asing yang tampak di sana-sini dalam penentuan dan implementasi kebijakan di lapangan. Di bawah ini adalah tiga masalah di kawasan yang dapat dijadikan *test-cases*, yakni penenggelaman kapal asing dalam upaya memerangi *illegal fishing*, operasi pencarian korban

*) Profesor Riset untuk masalah-masalah politik, keamanan, demokrasi, dan *non-traditional security threats*, pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, E-mail: pptogin@yahoo.com.



dan pesawat AirAsia, dan keterlibatan asing dalam penyusunan rencana strategis (Renstra) pertahanan nasional.

Penenggelaman Kapal Asing

Indonesia adalah salah satu negara dengan garis pantai terpanjang dan memiliki pulau-pulau besar dan kecil terbanyak di dunia. Indonesia menghadapi masalah *illegal fishing* yang dilakukan nelayan lokal, mancanegara, dan kolaborasi keduanya. Penangkapan ikan ilegal di Indonesia didominasi kapal-kapal besar milik pengusaha asing, kapal asing berbendera Indonesia dan hasilnya dibawa langsung ke Thailand, Tiongkok, dan Taiwan. Sebagai langkah awal untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meninjau ulang izin operasi kapal-kapal asing tersebut di Indonesia dan akan memboikotnya jika mereka tidak bersikap kooperatif.

Langkah kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang terkesan mempersulit perijinan tersebut sempat dikhawatirkan akan mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Namun demikian, apa yang dikhawatirkan para pengusaha dan birokrasi di kementerian terkait, termasuk Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tidak terjadi. Hal ini karena Menteri Susi telah menyiapkan langkah pro-aktif pencegahan lebih dahulu, dengan memberikan penjelasan pada para Duta Besar Tiongkok Thailand, Malaysia, Filipina, Taiwan, Jepang, dan Australia. Dengan demikian, kita dapat menegaskan bahwa, Menteri Susi telah melakukan upaya pro-aktif melampaui para diplomat Kemlu. Sementara itu, pihak Kemlu sendiri terlihat lambat dan kehilangan peran dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang diplomasi. Untuk sebagian, hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi di antara kedua kementerian tersebut. KKP sendiri lebih menjadi *media darling* daripada Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi sehingga peran dan kinerja Menlu menjadi kurang memperoleh perhatian atau liputan pers.

Sebagai langkah lebih tegas memerangi dan menghentikan *illegal fishing*, Menteri Susi juga memerintahkan penenggelaman setiap kapal yang tertangkap di lapangan terbukti telah dan sedang

melakukan *illegal fishing*. Tiga kapal asal Vietnam yang telah melakukan pencurian ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau, telah ditenggelamkan pada 4 Desember 2014. Kemudian, pada 21 Desember 2014, 2 kapal nelayan ilegal asal Thailand telah ditenggelamkan di Teluk Ambon, Maluku. Pada 28 Desember 2014, kapal nelayan Vietnam yang lain diledakkan di wilayah Laut Natuna. Terakhir kali, pada 8 Januari 2015, kapal kayu milik warga Malaysia yang tertangkap mencuri ikan, diledakkan di perairan Belawan.

Sayangnya, langkah tegas ini tampaknya tidak sepenuhnya didukung institusi penegak hukum dan kementerian lain, karena dikhawatirkan akan menimbulkan komplikasi hukum dan tindakan retaliasi pemerintah negara asal nelayan yang bermasalah. Beberapa pihak di Kemlu, misalnya Dirjen Asia Pasifik, Yuri O. Thamrin, dalam forum *Focus Group Discussion* di Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR pada 6 Januari 2015, semakin mencemaskan perkembangannya setelah tajuk *Bangkok Post*, 5 Januari 2015, mengingatkan dampaknya pada solidaritas ASEAN.

Dalam kenyataannya, tindakan retaliasi tidak terjadi karena pemerintah negara-negara ASEAN tampaknya dapat memahami langkah tegas Indonesia tersebut dan dalam rangka menghindari keadaan yang malah semakin buruk jika mereka melakukan retaliasi. Bagaimanapun, tajuk *Bangkok Post*, baru berupa opini yang tidak mewakili aspirasi rakyat Thailand dan ASEAN secara keseluruhan. Namun demikian, hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah masih adanya keraguan di antara pembuatan kebijakan di tingkat nasional dalam menghadapi tindakan pihak asing yang merugikan. Padahal, tanpa kesamaan pandangan dan langkah, pemerintah akan menghadapi kesulitan dalam menghadapi kepentingan asing yang merugikan kepentingan nasional.

Pemerintah Indonesia memang memiliki keterbatasan dalam memerangi dan menghentikan *illegal fishing* akibat keterbatasan alat dan aparat di lapangan. Namun begitu, kiranya pemerintah tetap harus mewaspadai agar solusi yang diambil lebih jauh oleh Menteri Susi, dengan memanfaatkan jalur diplomasi kemitraan

strategis, tidak boleh mengorbankan kedaulatan nasional dan tetap harus dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan pihak Kemlu. Juga, upaya meminta bantuan AL AS untuk mengawasi kegiatan dan menangkap pelaku *illegal fishing* tidak boleh tanpa sepengetahuan dan melibatkan pemangku kepentingan penting lainnya, seperti TNI-AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang telah terbentuk dan siap bekerja di lapangan. Di sini kita perlu menggarisbawahi bahwa setiap bantuan dalam perspektif kemitraan strategis harus dilakukan dengan prinsip kerja sama yang sejajar, saling menguntungkan dan menghormati. Tanpa kehadiran prinsip itu, kedaulatan nasional akan menjadi taruhannya, sebuah risiko yang tidak mudah dibandingkan dengan kerugian material yang dihasilkan.

Kecelakaan AirAsia

Kecelakaan pesawat penumpang AirAsia QZ8501 milik Malaysia pada 29 Desember 2014 lalu menandai kembali ramainya keterlibatan asing dengan gelar operasi alat utama sistem senjata (alutsista) modern mereka, pasca-Tsunami Aceh 24 Desember 2004. Data menunjukkan bahwa 11 negara telah menyampaikan tawaran dan segera mengirimkan bantuan mereka untuk membantu gelar operasi *Search and Rescue* (SAR) korban dan pesawat, seperti AS, Australia, Jepang, Korea Selatan, Prancis, Inggris, Rusia, Singapura, dan Malaysia.

Partisipasi dan keterlibatan asing yang mendalam ternyata memperoleh sambutan antusias Pemerintah RI. Hal itu dirasakan sangat membantu dan meringankan beban pemerintah di tengah-tengah keterbatasan alutsista dan SDM cakap yang tersedia. Selain itu, dalam prakteknya memang tidak ada larangan dan batasan untuk bantuan asing yang boleh diterima untuk mitigasi bencana sejauh hal itu tidak menjadi beban negara di kemudian hari. Selama ini kondisi alutsista Indonesia yang sangat terbatas baik dari sisi ketersediaan maupun kualitas kelayakannya merupakan rahasia umum dan menjadi agenda serius dalam rapat-rapat kerja DPR dan pemerintah.

Namun demikian, keterlibatan asing dalam masalah keamanan Indonesia tidak boleh tanpa batas dan direspons secara naif. Bantuan mereka tidak semata-mata untuk

kepentingan diplomasi publik mereka di kawasan, karena patut diingat bahwa negara asing juga memiliki kepentingan inheren. Penilaian ini perlu dilakukan karena hanya pada masa-masa darurat yang memaksa seperti ini saja, negara-negara lain bisa secara bebas masuk ke dan menjelajah wilayah Indonesia dengan alasan operasi SAR. Pada masa damai, selain dalam kerangka kerja sama militer dan pertahanan, atau latihan militer bersama, mereka tidak boleh masuk, menggunakan, dan menjelajah berbagai wilayah Indonesia secara resmi, apalagi di wilayah yang jauh dari kontrol pusat. Jika dipaksakan, tentu saja hal ini akan menjadi pelanggaran dan memberi citra buruk di dunia internasional. Bencana Tsunami Aceh 2004 memberikan preseden dan sekaligus contoh awal yang jelas tentang dalamnya keterlibatan asing dalam berbagai aktifitas mitigasi bencana, termasuk oleh Singapura negara kecil tetangga Indonesia.

Tanpa bencana Tsunami Aceh 2004, militer Singapura dengan peralatan mereka yang paling modern di antara negara-negara ASEAN lainnya, tidak mungkin bisa masuk dan menguji alutsistanya di wilayah tetangganya, Indonesia, yang hubungannya sering mengalami pasang-surut. Bahkan, untuk bisa melakukan latihan militer dan menggelar alutsistanya di daratan Riau saja, militer Singapura masih belum bisa disetujui oleh Pemerintah Indonesia sampai sekarang. Oleh karena itu, perjanjian ekstradisi kedua negara hingga saat ini tidak bisa disepakati.

Tragedi dan mitigasi bencana menyediakan kesempatan yang besar bagi berbagai negara asing untuk mengenali dan sekaligus mengintai wilayah Indonesia yang begitu luas. Tidak heran, banyak negara asing yang ingin terlibat dalam gelar operasional alutsista mereka yang canggih, baik di wilayah perairan dan udara, maupun daratan Indonesia dalam operasi SAR AirAsia QZ8501. Baik negara kecil seperti Singapura maupun negara-negara besar seperti AS dan Rusia, maupun kekuatan baru di kawasan, yaitu Tiongkok, mempunyai kepentingan besar dengan penggunaan wilayah Indonesia. Mereka memiliki kepentingan tidak untuk sekadar melakukan pengenalan tetapi juga kontrol wilayah demi kepentingan yang lebih besar di masa depan. Sebelum ini, aktifitas agresif kapal-kapal perang dan selam AS dan Tiongkok

di Alur Laut Kepulauan Indonesia dan pesawat-pesawat mereka telah terdeteksi oleh alutsista Indonesia. Bahkan, wacana pembukaan pangkalan militer negara asing di wilayah Indonesia sempat mengemuka di masa lalu.

Kerawanan Renstra Pertahanan

Di awal tahun 2015, muncul laporan bahwa proses penyusunan renstra pertahanan nasional 2015-2019 melibatkan institusi asal AS, yaitu *Defence Institution Reform Initiative* (DIRI), hingga ke hal-hal teknis. Jika ini direalisasi, pasca-penandatanganan MOU Kemenhan dengan DIRI, kiranya logis jika hal ini dinilai dapat menimbulkan kerawanan karena di sana terdapat aspek pengembangan manajemen pertahanan. Mulai dari tingkat strategis sampai teknis, untuk Kemenhan, Mabes TNI, dan 3 matra TNI akan bersumber dari DIRI.

Ironisnya, hal di atas tidak dianggap sebagai masalah sensitif bagi pertahanan nasional. Demi tercapainya kemandirian dalam industri pertahanan, Indonesia bebas mengembangkan kerja sama dengan banyak negara dan tidak mengandalkan satu negara saja untuk proses transfer teknologi. Dengan demikian, penentuan *minimum essential forces*, pembelian alutsista, dan pendefinisian persepsi ancaman tidak perlu melibatkan asing. Keterlibatan asing akan semakin rawan apalagi jika keterlibatan itu lebih jauh yang menyangkut pengerahan pasukan.

Indonesia harus tetap mengikuti perkembangan keamanan yang dinamis di kawasan jika ingin mempertahankan kehadirannya secara tegas dan bermartabat di dunia internasional. Keterlibatan asing dapat meringankan beban Indonesia tetapi akan memunculkan ketergantungan pada pihak asing yang lebih mendalam. Hal tersebut akan sangat berbahaya karena taruhannya adalah semakin tergerusnya kedaulatan negara.

Penutup

Respons terhadap *illegal fishing*, kecelakaan pesawat AirAsia, dan penyusunan renstra pertahanan telah mengungkap betapa tidak mudah dan konsistennya penentuan, penyusunan dan implementasi kebijakan pemerintah baru.

Sekalipun gagasan yang dimunculkan tampak relevan namun hal tersebut tidak lepas dari masalah baru yang lebih kompleks dan berisiko, jika pengambil keputusannya tidak memahami dan memiliki kecakapan (kapabilitas) yang memadai. Harus disadari, munculnya kemungkinan negara asing memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang tersedia dan yang memang ditawarkan Indonesia akan berdampak buruk terhadap prospek keamanan nasional.

Konsekuensinya, para pengambil keputusan di pemerintah baru Indonesia harus memiliki kecakapan yang dibutuhkan, dan tidak boleh bermental inlander, bersikap naif, dan 'genit' dengan pihak dan bantuan asing. Mereka tidak boleh terlalu cepat dan mudah membuka pintu untuk asing atas wilayah-wilayah yang patut dipertahankan kerahasiaannya karena hal ini terkait dengan nasib rakyat dan kedaulatan negara. Keramahmatan dan sikap transparan berlebihan sebagai tuan rumah, dan sebaliknya, tekanan pihak asing, tidak boleh menjadi *excuse* untuk kebijakan yang keliru tersebut sehingga kita semua tidak perlu terlambat menyadari akan berisiko terancam kedaulatan nasionalnya di masa depan.

Referensi

- "Alutsista kurang layak untuk SAR." *Media Indonesia*, 8 Januari 2014.
- "Indonesia is Wrong." *Bangkok Post*, 5 January 2015.
- Huda, Mas Alamil. "Kekuatan Asing Dikurangi." *Republika*, 9 Januari 2015.
- Juwita, Nurulita. "Asing Kontrol Pertahanan Indonesia." *Media Indonesia*, 8 Januari 2015.
- "Susi Kecewa Ikan Indonesia Diolah Negara Lain." *Koran Tempo*, 1 November 2014.
- "TNI Tenggelamkan Tiga Kapal Asing Pencuri Ikan." *Vivanews, Yahoo News Indonesia*, 4 Desember 2014.
- Pattiradjawane, Rene. "ASEAN, Pekarangan Strategis Indonesia." *Kompas*, 7 Januari 2015.